



EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK DENGAN SIKDES (SISTEM INFORMASI KONEKTIVITAS DESA) (Studi Kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang)

¹Satrio Ageng Rihardi, ²Arnanda Yusliwidaka, ³Sukron Mazid

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Magelang ^{1,2,3}

Received: 28 Maret 2019. ; Accepted: 17 April 2019.; Published: 30 April 2019

Abstrak

Menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan sebaik-baiknya menuju good governance. Salah satu program prioritas yang bersifat strategis adalah mampu menggunakan atau mengoperasionalkan sebuah aplikasi pelayanan yang cepat dan prima. Sistem berbasis IT untuk desa seperti Program aplikasi IT lainnya, salah satunya adalah sistem SIKDES yaitu sistem informasi konektivitas desa. Efektivitas pemerintahan dalam pelayanan publik dengan sistem informasi konektivitas desa (SIKDES) studi kasus di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang memiliki tujuan untuk menjelaskan alasan keberhasilan Desa Sidorejo dalam menerapkan sistem SIKDES, hambatan Desa untuk menerapkan sistem SIKDES dalam pelayanan, peran perangkat desa sangat penting terhadap keberhasilan tersebut dan respon yang dirasakan masyarakat pengguna layanan SIKDES terkait penerapan sistem tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data penelitian dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Keabsahan data dalam penelitian ini diperoleh melalui triangulasi (sumber dan metode), diskusi ahli, dan pencocokan data dengan teori. Analisis data yang digunakan berdasarkan pada model analisis Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian pertama, penerapan SIKDES membawa perubahan pada kinerja pemerintah dan berdampak bagi masyarakat. Adanya sistem SIKDES tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Desa Sidorejo namun juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan surat menyurat dari kantor Desa karena sudah berbasis teknologi. Kedua, Kendala utama penerapan sistem SIKDES adalah kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem SIKDES dipelayanan kantor desa dalam hal ini adalah perangkat desa sehingga menyebabkan masih terhambatnya proses pelayanan, serta ketidakdisiplinan perangkat desa dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten.

Kata Kunci : Efektivitas; Pemerintahan; Pelayanan Publik; SIKDES

PENDAHULUAN

Menghadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan peluang, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan pelayanan sebaik-baiknya menuju *good governance*. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan publik yang berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan dan akuntabilitas. Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah untuk hanya terfokus pada usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-masing. Penerjemahan seperti ini ternyata belum cukup efisien dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan teknologi yang berkembang pesat mengakibatkan sertiap instansi harus berbenah, dalam berbagai hal, terutama yang berkaitan dengan pelayanan publik yang efektif dan efisien yaitu dengan selalu update serta meleak teknologi informasi. Desa sebagai garda terdepan merupakan gerbang pelayanan menuju *goodcitizhenship*. Sebagai upaya dalam menciptakan dan memajukan setiap pelayanan publik yang ada. Perkembangan yang maju juga harus diimbangi oleh SDM yang mumpuni dan memadahi. Pemerintahan menjadi pelayanan publik dalam keberlangsungan kehidupan

berbaga dan bernegara terkait adminsitrasii tertib hukum.

Menurut Philip Kotler yakni Pelayanan atau *service* adalah setiap kegiatan atau manfaat yang dapat diberikan suatu pihak kepada pihak lainnya yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak pula berakibat pemilikan sesuatu dan produksinya dapat atau tidak dapat dikaitkan dengan suatu produk fisik.¹ Dengan pelayanan yang prima dan cepat berdampak pada kepuasan masyarakat. Sedangkan pelayanan yang buruk, lambat membuat masyarakat tidak puas dan berdampak pada kejengkelan serta memperburuk pemerintah sebagai pelayan publik. Masyarakat harusnya butuh cepat sedangkan pelayanan lambat, mengganggu semua aktivitas dan harapan manusia dalam kelangsungan kehidupan bermasyarakat terutama terkait dengan tertib administrasi. Oleh karena itu, perlu adanya sistem yang bisa membantu dalam proses pelayanan publik. Perlu ada inovasi sehingga dalam pelayanan bisa efektif dan efisien. Pelayanan adalah suatu proses kepada orang lain dengan cara tertentu memerlukan kepekaan agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan.²

Alasan mengapa penelitian mengenai efektivitas pelayanan publik Desa Sidorejo dengan menggunakan sistem informasi

¹ Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan*, (Jakarta : Rineka Cipta , 2003), h. 11

² Ahmad Tjahjono, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta :PT. Grafindo Persada, 2003), h.345

konektivitas Desa (SIKDES) penting dilakukan dua alasan tersebut meliputi alasan empiris dan alasan teoritis. Secara empiris munculnya sistem SIKDES di Desa Sidorejo didasari pada dua dasar hukum yang *pertama*, bagian ketiga undang-undang desa no 6 tahun 2014 pasal 86 tentang Sistem Informasi Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan Perdesaan jelas disebutkan bahwa desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi yang dikembangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

Kedua, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 Bab IV Pasal 4 dijelaskan bahwa kebijakan dan strategi pengelolaan data desa adalah satu sistem data dan informasi desa, berupa data terintegrasi dari berbagai sumber data melalui perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Dan *ketiga*, melalui RPJMDes, RKPDes, serta APBDes Desa Sidorejo terkait Kebijakan Umum dan Pembangunan Daerah yaitu pembangunan pusat pengembangan informatika Desa sebagai inovasi desa maju. Dengan program teknologi informasi di era millenium yang serba canggih dan cepat menuntut sebuah desa untuk mampu mengikuti perkembangan yang ada guna sebuah pelayanan yang efektif dan efisien.

Salah satu program prioritas yang bersifat strategis adalah mampu

menggunakan atau mengoperasikan sebuah aplikasi pelayanan yang cepat dan prima. Maka dari itulah Pemerintah Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang bekerja sama dengan relawan TIK Kecamatan maupun Kabupaten Magelang mengembangkan program pusat informasi pelayanan terpadu. Informasi pelayanan terpadu sendiri mengembangkan beberapa sistem berbasis IT untuk desa seperti Program aplikasi IT lainnya, salah satunya adalah sistem SIKDES yaitu sistem informasi konektivitas desa yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Perubahan yang didesakkan kepada pemerintah dalam bidang pelayanan publik terjadi akibat dari masih maraknya praktek pelayanan publik kepada masyarakat dengan proses yang berbelit-belit, sehingga membutuhkan jangka waktu yang lama, proses yang menghabiskan banyak biaya serta masih terjadinya indikasi praktek pungli dan KKN. Ditambah lagi kemampuan pemerintah melaksanakan kegiatan secara efisien, berkeadilan, dan bersikap responsif terhadap kebutuhan masyarakat masih sangat terbatas. Karakter buruk yang selama ini disandang pemerintah dapat diperbaiki dengan penggunaan sistem *Good Governance* di dalam pemerintah itu sendiri, *good governance* memiliki pengertian secara umum yaitu praktek dan tata pemerintah yang mengatur sumber daya dan memecahkan masalah-masalah publik. Kualitas *governance* dinilai dari kualitas interaksi yang terjadi antara komponen

governance yaitu pemerintah, masyarakat dan sektor swasta.

Adapun hasil kajian penelitian yang relevan adalah sebagai berikut, *pertama* penelitian oleh Layaman dan Suci Hartantai, Jurnal Benefit UMS, tentang studi efektifitas pelayanan public di kota kejaksaan Cirebon yaitu Variabel disiplin kerja (X1) dan iklim kerja (X2) mempunyai pengaruh bersama, artinya kedua variabel tersebut selalu mempengaruhi efektivitas pelayanan publik di Kecamatan Kejaksaan Cirebon dan Variabel disiplin kerja dan iklim kerja secara parsial mempunyai pengaruh terhadap efektivitas pelayanan publik. *Kedua* penelitian oleh Apriyansyah, dkk. Jurnal JAKPP UNHAS, studi tentang efektifitas system informasi Desa dalam Pelayanan Publik di Desa Dlingo, Kec. Dlingo, Kab. Bantul yaitu Efektivitas Sistem Informasi Desa (SID) didukung oleh 6 indikator, dan dari ke 6 indikator tersebut dapat diurutkan yang paling efektif ada kualitas informasi, kualitas pelayanan, kualitas sistem, kepuasan pengguna, net benefit, dan yang terakhir ada sumber daya manusia. Ada kesamaan dari beberapa penelitian terdahulu, tetapi focus peneliti ini pada system informasi SIKDES yang dikembangkan di Kabupaten Magelang

Peneliti objek kajiannya kepada SIKDES, karena menjadi andalan bagi desa-desa yang ada di Kabupaten Magelang. perjalanan waktu kurang lebih dua tahun

semenjak informasi layanan terpadu diresmikan dan SIKDES diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, hanya beberapa Kecamatan di Magelang yang sudah cukup berhasil dalam mengoperasikan SIKDES dikarenakan terbatasnya SDM dan belum mapan serta siap Desa menggunakan aplikasi tersebut. Desa Sidorejo terus berbenah dalam hal pengembangan teknologi Desa, supaya bisa mengoperasikan SIKDES sehingga menjadi efektif serta efisien dalam melayani warga masyarakat dalam hal surat-menyurat dan lain-lain sehingga pelayanan yang ada di Desa menjadi cepat, tepat, efektif dan efisien.

Pengembangan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi ini dilakukan pemerintah Kabupaten Magelang dengan tujuan ingin membuat pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Magelang terutama di Desa-desa dengan proses yang lebih cepat serta memudahkan. Selain itu, menuntut untuk perangkat desa lebih bekerja aktif dan meningkatkan sistem kerjanya karena sistem SIKDES ini membutuhkan kemampuan dalam mengaplikasikan teknologi, serta sistem ini dapat mengurangi intensitas tatap muka antara masyarakat dengan perangkat desa dalam mengurus surat-menyurat dan lainnya sehingga menghindari terjadinya pungutan liar (Pungli) atau indikasi korupsi lainnya.

Sebuah inovasi teknologi dalam pengembangan sebuah pelayanan publik perlu adanya teknologi informasi (kebaruan) dalam

kehidupan masyarakat. Efektifitas waktu serta biaya juga menjadi bagian terpenting dalam setiap pelaksanaan dan pengambilan keputusan serta memutuskan dalam menjalankan roda pemerintahan. Maka dari itu perlu adanya sebuah inovasi yang mampu menjawab tantangan zaman, yaitu sebuah teknologi informasi berupa aplikasi yang terkoneksi ke system-sistem pelayanan yang ada di desa ke kecamatan dan kabupaten.

Efektivitas pemerintahan dalam pelayanan publik dengan SIKDES di Desa Sidorejo menjadi judul dalam penelitian ini. Sedangkan Desa Sidorejo merupakan desa yang terletak di pingiran Kabupaten Magelang yang telah menggunakan SIKDES tersebut. Efektivitas pelayanan inilah yang penulis teliti dan dikaji lebih dalam, terutama terkait Ilmu Pemerintahan dan kebijakan publik yang digunakan dalam meninjau permasalahan pelayanan publik. Ketika persoalan efektivitas pelayanan publik diangkat menjadi suatu kajian ilmiah berupa penelitian dan merekomendasikan dalam Ilmu Pemerintahan dan kebijakan publik. Sebuah organisasi pemerintah itu sendiri juga harus mengkaji bagaimana kondisi pelayanan publik sebelum dan sesudah adanya efektivitas serta inovasi yang dijalankan pemerintah daerah itu sendiri dan bagaimana respon dari masyarakat terhadap adanya inovasi pemerintah dalam pelayanan publik yang telah diberikan.

Mengingat luasnya permasalahan yang dapat diidentifikasi dan juga mengingat keterbatasan waktu dan biaya maka perlu dibatasi masalah-masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah terbatas pada Efektivitas Pemerintahan dalam Pelayanan Publik dengan SIKDES (Sistem Informasi Konektivitas Desa). Permasalahannya perlunya ada inovasi desa, program desa dan aplikasi desa yaitu berupa system informasi yang efektif dan efisien serta mampu memberikan kemudahan dalam melayani masyarakat. Dapat dirumuskan yaitu bagaimana peran pemerintah Desa dalam pelayanan public melalui SIKDES?

METODE PENELITIAN

Berangkat dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai Efektivitas Pemerintahan dalam Pelayanan Publik dengan SIKDES (Sistem Informasi Konektivitas Desa) menggunakan metode penelitian. Dilihat dari sifat dan tujuan maka metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif Metode deskriptif adalah salah satu jenis metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya.³ Tempat penelitian ini adalah di Desa Sidorejo Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang. Sumber Data Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini

³ Sugiyono, 2014. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Hal, 6.

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisis Data Triangulasi data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan triangulasi metode. Sedangkan Analisis data terdiri atas tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan suatu bentuk jasa pelayanan baik dalam bentuk barang publik atau jasa publik. Pemerintah baik instansi di tingkat pusat dan tingkat di daerah pada prinsipnya memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan pemerintah kepada publik dituntut untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan yang prima dan kompeten. Hal ini dapat dilihat dari kompetensi dari sisi Sumber Daya Manusia yang memadai yang tentunya harus didukung dengan kebutuhan sarana dan prasarana. Arah pembangunan kualitas manusia tadi adalah memberdayakan kapasitas manusia dalam arti menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya untuk mengatur dan

menentukan masa depannya sendiri.⁴ Dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, karenanya birokrasi publik berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang baik dan profesional.⁵ Dalam kondisi saat ini, perlu kiranya menciptakan kualitas pelayanan publik dan partisipasi masyarakat yang menjadi nilai yang penting untuk mencapai cita-cita sebagai negara kesejahteraan sebagai perwujudan pelayanan publik yang sesuai dengan koridor tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan ini, maka partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pelayanan publik akan menjadi sangat penting dalam merumuskan kriteria pelayanan yang dilaksanakan oleh pemerintah, cara pemberian pelayanan termasuk sikap dan layanan berupa mekanisme pengaduan masyarakat sampai dengan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik. Hal ini sebagai upaya untuk membangun komitmen secara bersama untuk menciptakan pelayanan publik yang memiliki kualitas.

Adapun bentuk pelayanan publik yang ideal dicirikan dengan memberikan pelayanan yang efektif adalah dengan mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran, kemudian dilakukan secara

⁴ Akhmad Sukardi, *Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, tanpa tahun, h. 31

⁵ P.J.J Sipayung (Editor), *Pejabat Sebagai Calon Tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: CV. Sri Rahayu, 1989, h. 55

seederhana, cepat, tepat dan tidak berbelit-belit sehingga mudah untuk dipahami dan mudah untuk dilaksanakan oleh masyarakat, selain itu ada kejelasan dan kepastian dalam pelayanan meliputi jadwal waktu penyelesaian pelayanan yang jelas. Sedangkan pelayanan publik yang efisiensi adalah mengandung arti dengan sesuai dengan sasaran pelayanan yang berkaitan dengan produk, pencegahan pengulangan pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen, responsif dan adaptif.

Dengan demikian perlu adanya inovasi berupa program dari pemerintah selaku pelayanan public, yang bisa mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi di Desa agar mudah, murah, tepat dan efisien. Kabupaten Magelang pada bagian system informasi, meluncurkan SIKDES, system konektivitas Desa harapannya mampu memberikan kemudahan dalam pelayanan public di desa-desa.

Efektivitas Pemerintahan Desa

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk melakukan kegiatan pelayanan publik. adapun di dalam Pasal 8 UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sekurang-kurangnya adalah meliputi:

- a. Pelaksanaan pelayanan;
- b. Pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. Pengelolaan informasi;
- d. Pengawasan internal;
- e. Penyuluhan kepada masyarakat; dan
- f. Pelayanan konsultasi.

Kemudian dalam melaksanakan pelayanan publik, menurut Pasal 15 UU nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara berkewajiban:

- a. Menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
- b. Menyusun, menetapkan, dan memublikasikan maklumat pelayanan;
- c. Menempatkan pelaksana yang kompeten;
- d. Menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptanya iklim pelayanan yang memadai;
- e. Memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
- f. Melaksanakan pelayanan sesuai dengan standard pelayanan;
- g. Berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan

- penyelenggaraan pelayanan publik;
- h. Memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan;
 - i. Membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya;
 - j. Bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik;
 - k. Memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan; dan
 - l. Memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Hal yang paling utama dalam pelayanan publik itu dimulai dari tingkatan yang paling rendah yakni dipemerintahan desa tetap harus menerapkan asas-asas dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan pemerintah desa merupakan gerbang utama dalam memberikan pelayanan publik, pelayanan publik yang primalah yang diharapkan oleh seluruh masyarakat.

Pemerintah desa wajib untuk membuat standar pelayanan publik yang merupakan standar pelayanan yang wajib disediakan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk menjamin kualitas minimal dari suatu pelayanan publik yang nantinya akan dinikmati oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, dalam memberikan pelayanan publik diharuskan untuk gratis dan tidak dikenakan tarif/biaya dalam kepengurusan administrasi kependudukan.⁶ Seperti yang dijelaskan di dalam Pasal 31 ayat (2) UU Pelayanan Publik mengenai biaya/tarif pelayanan publik merupakan tanggung jawab negara. Dengan demikian pelayanan administrasi kependudukan seperti penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran, karena surat-surat tersebut merupakan surat yang harus dimiliki oleh setiap warga Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sudah seharusnya

⁶ Pasal 31 Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

pelayanan administrasi kependudukan diselenggarakan secara gratis.

Adapun undang-undang di atas, menjelaskan terkait pelayanan desa yang harapannya memudahkan dalam memberikan pelayanan. Dalam hal ini, pelayanan public mampu memberikan kemudahan dan meringankan masyarakat dalam administratif, dengan adanya UU tersebut paling tidak memberikan ruang kepada aplikasi system informasi desa berupa SIKDES, karena merupakan bentuk inovasi dalam hal pelayanan desa.

Efektivitas sistem pelayanan publik dengan SIKDES (Sistem Informasi Konektivitas Desa)

Pemerintah Desa khususnya di Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, dengan melihat situasi perkembangan zaman yang mengharuskan membuat inovasi atau perubahan. Pemerintah Kabupaten Magelang memfasilitasi untuk memberikan pelayanan publik melalui desa-desa yang terdapat di Kabupaten Magelang. Hal ini dilaksanakan dalam rangka membangun data kependudukan yang akurat serta bermanfaat dalam peningkatan pelayanan publik khususnya pelayanan masyarakat khususnya di tingkat desa.

Aplikasi system informasi dan konektivitas Desa "SIKDES" memberikan pelayanan dengan baik dan efektif, disebabkan pada era sekarang, semua

system yang bekerja berbasis teknologi informasi. Salah satunya SIKDES mampu meminimalisir alur pekerjaan yang panjang. Semua system kerja secara manual terutama terkait administrasi bisa berjalan dengan efektif. SIKDES sendiri mampu memberikan terobosan sebagai inovasi desa dalam memberikan pelayanan public yang cepat, tepat, hemat, murah dan tepat waktu. Hal ini, dirasakan sebagian besar warga masyarakat di Desa Sidorejo, Bandongan, Magelang. Penerapan SIKDES membawa perubahan pada kinerja pemerintah dan berdampak bagi masyarakat. Adanya sistem SIKDES tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Desa Sidorejo namun juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan surat menyurat dari kantor Desa karena sudah berbasis teknologi. Masyarakat dimanjakan dengan adanya SIKDES. Peran pemerintah desa dalam menggunakan SIKDES, yaitu dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terlebih dahulu, karena terbilang sebuah aplikasi baru, paling tidak memberikan inovasi desa yang mutakhir. Dalam hal ini, bisa berdampak pada efektifitas dan efisiensi dalam pelayanan public. Sehingga warga masyarakat terlayani dengan baik serta mendapatkan kepuasan.

Kendala utama penerapan sistem SIKDES adalah kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem SIKDES dipelayanan kantor desa dalam hal ini adalah perangkat desa sehingga menyebabkan masih terhambatnya proses pelayanan, serta

ketidakdisiplinan perangkat desa dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten. Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Sidorejo, kendala utama adalah dengan masih rendahnya sumber daya manusia dari perangkat desa, sehingga dengan perkembangan teknologi informasi yang canggih, belum siap dan belum bisa maksimal dalam mengopersikannya. Padahal dengan adanya SIKDES paling tidak bisa meringankan beban pekerjaan para perangkat desa. Selain itu juga minimnya pengetahuan warga masyarakat setempat, hal ini masih beberapa kali dalam administrasi familiarnya manual.

Aplikasi Sistem Informasi dan Koneksitas Desa "SIKDES" yang sudah dilaksanakan di seluruh Desa, termasuk Desa Sidorejo yang di Kabupaten Magelang. Melalui aplikasi SIKDES dapat tersinkronisasi data kependudukan antara *data base* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dengan data desa. Sekaligus SIKDES ini sebagai media pelaporan kondisi kependudukan serta pemutakhiran data kependudukan desa. Pernyataan ini diperkuat dengan Silviana selaku Ka.Sie Pelayanan Desa Sidorejo, memang sudah banyak pelatihan-pelatihan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang mengenai penggunaan SIKDES. Dengan seringnya digunakan dan dioperasionalkan SIKDES menjadi aplikasi

favorit bagi desa-desa di Kabupaten Magelang. Dimungkinkan menjadi aplikasi yang efektif dalam pengadministrasian sebagai inovasi pada pelayanan public.

Tujuan SIKDES adalah untuk mempermudah dan mempercepat layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat, selain itu aplikasi SIKDES dapat digunakan untuk mengetahui profil kependudukan desa sehingga bisa dijadikan salah satu acuan untuk perencanaan pembangunan desa. Meskipun sudah disosialikan namun menurut Silviana, SIKDES belum berjalan secara optimal, sehingga yang digunakan saat ini masih banyak yang menggunakan kepengurusan kependudukan secara manual. Hal ini disebabkan karena kurangnya Sumber Daya Manusia yang belum memadai, terutama dalam mengoperasikan SIKDES, ujanya.

Salah satu solusinya adalah pusat layanan informasi yang ada di kabupaten, untuk sering memberikan sosialisasi dan pelatihan serta pendampingan dalam mengoperasikan SIKDES, hal ini karena daerah di Kabupaten Magelang yang luas dan dengan persoalan yang beragama, baik SDM, wilayah serta Jangkuan. Dengan adanya saling terbuka dan kerjasama antara kabupaten, Desa dan masyarakat, harapanya SIKDES menjadi aplikasi favorit dalam pelayanan public, sehingga dalam proses melayani masyarakat bisa efektif dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terutama terkait Penyelenggaraan efektifitas system informasi konektivitas desa SIKDES di Desa Sidorejo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, dapat disimpulkan *pertama*, Penerapan SIKDES membawa perubahan pada kinerja pemerintah dan berdampak bagi masyarakat. Adanya sistem SIKDES tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Desa Sidorejo namun juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan surat menyurat dari kantor Desa karena sudah berbasis teknologi. Masyarakat dimanjakan dengan adanya SIKDES. Peran pemerintah desa dalam menggunakan SIKDES, yaitu dengan cara memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terlebih dahulu, karena terbilang sebuah aplikasi baru, paling tidak memberikan inovasi desa yang mutakhir.

Kedua, kendala utama penerapan sistem SIKDES adalah kemampuan sumber daya manusia dalam menggunakan sistem SIKDES dipelayanan Desa dalam hal ini adalah perangkat desa sehingga menyebabkan masih terhambatnya proses pelayanan, serta ketidakdisiplinan perangkat desa dalam mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh Kecamatan maupun dari Kabupaten. Berdasarkan wawancara dengan perangkat Desa Sidorejo, kendala utama adalah dengan masih rendahnya sumber daya manusia dari perangkat desa, sehingga dengan perkembangan teknologi

informasi yang canggih, belum siap dan belum bisa maksimal dalam mengoperasikannya.

Berdasarkan pada simpulan maka sarannya adalah *pertama*, bagi pemerintah desa SIKDES aplikasi paling efektif ada informasi, kualitas pelayanan, kualitas sistem, kepuasan pengguna, dan menjadi system informasi yang akurat dalam memberikan pelayanan publik. *Kedua*, diadakan diklat atau pelatihan terkait pembuatan konten informasi yang baik, dan pengelolaan SIKDES yang benar agar perangkat desa mampu memberikan pelayanan yang maksimal serta masyarakat merasa lebih puas ketika diberikan pelayanan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tjahjono, 2003. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Akhmad Sukardi, *Participatory Governance dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*, Laksbang Pressindo: Yogyakarta.
- Boediono, 2003. *Pelayanan Prima Perpajakan*, Jakarta: Rineka Cipta
- Dwiyanto, Agus, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik Di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan Dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Fandy, Tjiptono, 2000, *Manajemen Jasa, Edisi Kedua*, Yogyakarta: Andy Offset
- Hoyle, R.H. (1995). *The structural equation modeling approach*. Dalam R.H. Hoyle (Ed), *Structural equation modeling: Concepts, issues and applications* (pp. 1- 15). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Kasmir. 2010. *Manajemen Perbankan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada
- Malayu Hasibuan, 2005. *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT Bumi Aksara
- Maria Eni Surasih, 2006. *Pemerintahan Desa dan Implementasinya*, Jakarta: Erlangga.
- Moenir, 2006, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara

- P.J.J Sipayung (Editor), 1989. *Pejabat Sebagai Calon Tergugat Dalam Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: CV. Sri Rahayu.
- Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2016 Bab IV Pasal 4 dijelaskan bahwa kebijakan dan strategi pengelolaan data desa adalah satu sistem data dan informasi desa.
- Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Sugiyono, 2014. *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutoro Ejo, 2005. *Pembaharuan Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pmd Press.
- Undang-Undang No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintahan Desa/Marga*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Widodo, Joko 2001, *Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah*. Surabaya: Insan Cendekia.